



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2163, 2016

KEMENKEU. ASN. Tabungan Hari Tua. Jaminan
Kecelakaan Kerja. Jaminan Kematian.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 241/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan keuangan badan penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan iuran Tabungan Hari Tua;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan pelaporan penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5407);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan:

1. Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat THT PNS adalah program tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.
2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Program Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan

akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian bagi Aparatur Sipil Negara.

4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT PNS dan program JKK dan JKM.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
10. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

BAB II

PENGELOLAAN IURAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Iuran Program

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT PNS dan program JKK dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran program THT PNS dan program JKK dan JKM.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Bagian Kedua

Kesehatan Keuangan Pengelola Program

Pasal 4

- (1) Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban.
- (3) Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT PNS ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga
Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas kekayaan dalam bentuk:
 - a. investasi; dan
 - b. bukan investasi.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dikuasai oleh Pengelola Program;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.

Paragraf 1

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT PNS ditambah cadangan teknis program JKK dan JKM.

Paragraf 2

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi
Untuk Program THT PNS

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk

program THT PNS ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peringkat yang sama dengan atau satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- f. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan mayoritas, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif

- penyertaan terbatas; dan/atau
- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - l. penyertaan langsung; dan/atau
 - m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
 - 1) dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama pengelola program;
 - 2) memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
 - 3) tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;

- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan
- m. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - e. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - f. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap pihaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah *medium term notes* yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - g. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap

- pihaknya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- h. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - i. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - j. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - k. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
 - l. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), untuk setiap pihak paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 3

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi
Untuk Program JKK dan JKM

Pasal 11

Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKM ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar

- yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
 - c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
 - d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
 - e. Reksa Dana berupa:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat

- puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
 - e. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

Paragraf 4

Ketentuan Lain Mengenai Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 14

- (1) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 pada satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi, kecuali pada penempatan instrumen investasi Surat Berharga Negara.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
 - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan/atau

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (3) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pasal 15

- (1) Kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) ditentukan pada saat penempatan dalam instrumen investasi dilakukan.
- (2) Nilai investasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

Pasal 16

- (1) Pengelola Program dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan aset dalam bentuk investasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dalam bentuk investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola Program tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dalam bentuk investasi yang dilakukan

oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Penyesuaian Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 17

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai instrumen investasi, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan batasan penempatan instrumen investasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Pasal 18

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi dilakukan, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali penempatan jumlah instrumen investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

Paragraf 6

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 19

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dilakukan dalam jenis:

- a. kas dan bank;

- b. piutang iuran program THT PNS dan program JKK dan JKM;
- c. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) program THT PNS;
- d. piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
- e. piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program; dan/atau
- f. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan.

Pasal 20

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan ketentuan:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. piutang iuran untuk program THT PNS, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. piutang iuran untuk program JKK dan JKM, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan;
- d. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) untuk program THT PNS, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- f. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan; dan
- g. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
 - a. kewajiban manfaat polis masa depan program THT PNS;
 - b. cadangan teknis program JKK dan JKM;
 - c. utang klaim program THT PNS dan program JKK dan JKM;
 - d. utang investasi; dan/atau
 - e. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.
- (2) Kewajiban manfaat polis masa depan program THT PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk estimasi kewajiban klaim.
- (3) Cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cadangan iuran atas resiko yang belum dijalani;
 - b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
 - c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
- (4) Kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk cadangan teknis program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan metode dan asumsi

perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.

Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk kewajiban manfaat polis masa depan dan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun, sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan nonkonsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.
- (2) Laporan keuangan nonkonsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 25

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran:
 - a. laporan keuangan triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan;
 - b. laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
 - c. laporan penyelenggaraan program triwulanan per 31

Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan

- d. laporan penyelenggaraan program tahunan per 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Bentuk dan isi laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Pengelola Program wajib mengumumkan laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi, dan tingkat solvabilitas, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
- (4) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:
 - a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
 - b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
 - c. kekayaan di luar negeri;
 - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
 - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud padahuruf d.
- (2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah seluruh investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 29

Direksi Pengelola Program, dewan komisaris Pengelola Program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset Pengelola Program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengelola Program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan kekayaan yang diperkenankan Pengelola Program selain untuk kepentingan Pengelola Program, kepada:

- a. direksi atau dewan komisaris dari Pengelola Program;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Pengelola Program;
- c. direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB V
SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Deposito pada Bank
- S. Format Laporan Rincian B-1 Saham
- T. Format Laporan Rincian C-1 Obligasi
- U. Format Laporan Rincian C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- V. Format Laporan Rincian D-1 Sukuk
- W. Format Laporan Rincian E-1 Surat Berharga Negara
- X. Format Laporan Rincian F-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian G-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian H-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (2)
- BB. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (3)
- CC. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (4)
- DD. Format Laporan Rincian L-1 Efek Beragun Aset
- EE. Format Laporan Rincian M-1 Unit Penyertaan Real Estat
- FF. Format Laporan Rincian N-1 Penyertaan Langsung

- GG. Format Laporan Rincian O-1 Tanah Dan Bangunan
- HH. Format Laporan Rincian P-1 Piutang Iuran (1)
- II. Format Laporan Rincian Q-1 Piutang Iuran (2)
- JJ. Format Laporan Rincianrincian R-1 Piutang Investasi
- KK. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Hasil Investasi
- LL. Format Laporan Rincian T-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title) Atau Tanah Dengan Bangunan
- MM. Format Laporan Rincian U-1 Utang Klaim
- NN. Format Laporan Rincian V-1 Utang Investasi
- OO. Format Laporan Rincian W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- PP. Format Laporan Rincian X-1 Cadangan Teknis
- QQ. Format Laporan Rincian Y-1 Kewajiban Jangka Pendek Yang Masih Harus Dibayar
- RR. Format Laporan Rincian Z-1 Pendapatan Premi
- SS. Format Laporan Rincian Aa-1 Hasil Investasi
- TT. Format Laporan Rincian Ab-1 Beban Klaim Dan Manfaat (1)
- UU. Format Laporan Rincian Ab-2 Beban Klaim Dan Manfaat (2)
- VV. Format Laporan Rincian Ac-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar
- WW. Format Laporan Rincian Ad-1 Perkembangan Portepel

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
Per/ Triwulan Tahun *)

1 Nama Perusahaan :
2 Alamat lengkap :
3 Telepon dan Fax. :
4 E-mail :
5 NPWP :
6 No. & Tgl Izin Usaha :
7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
8 Auditor Eksternal :
9 Pemegang Saham :

| Nama Pemegang Saham | Kepemilikan Saham | |
|---------------------|-------------------|------------|
| | Rupiah | Persentase |
| | | |
| Total | | |

10 Direksi dan Komisaris

| Direksi | | Komisaris | |
|---------|---------|-----------|---------|
| Nama | Jabatan | Nama | Jabatan |
| | | | |

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

| Nama | Jabatan | Email | No Telp/ HP |
|------|---------|-------|-------------|
| | | | |

.....
PT Taspen (Persero)

(Nama Direksi)
Direksi

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

C. FORMAT DAFTAR ISI

| LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA Per/ Triwulan Tahun *) | |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | Halaman |
| I Neraca | ... |
| II Perhitungan Laba / Rugi | ... |
| II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil | ... |
| II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara | ... |
| II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara | ... |
| III Laporan Arus Kas | ... |
| IV Laporan Perubahan Modal | ... |
| V Rasio Kesehatan Keuangan | ... |
| A. Batas Tingkat Solvabilitas | ... |
| B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas | ... |
| VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris | ... |
| VII Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP | ... |
| Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak | ... |
| Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak | ... |
| I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan | ... |
| II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi | ... |
| Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi | ... |
| Rincian | |
| A-1 Deposito pada Bank | ... |
| B-1 Saham | ... |
| C-1 Obligasi | ... |
| C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing | ... |
| D-1 Sukuk | ... |
| E-1 Surat Berharga Negara | ... |
| F-1 Medium Term Notes | ... |
| G-1 Utang Subordinasi | ... |
| H-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | ... |
| I-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | ... |
| J-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | ... |
| K-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | ... |
| L-1 Efek beragun aset | ... |
| M-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | ... |
| N-1 Penyertaan Langsung | ... |
| O-1 Tanah dan Bangunan | ... |
| P-1 Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM | ... |
| Q-1 Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT PNS | ... |
| R-1 Piutang Investasi | ... |
| S-1 Piutang Hasil Investasi | ... |
| T-1 Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | ... |
| U-1 Utang Klaim | ... |
| V-1 Utang Investasi | ... |
| W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | ... |
| X-1 Cadangan Teknis | ... |
| Y-1 Kewajiban Lainnya | ... |
| Z-1 Pendapatan Premi | ... |
| AA-1 Hasil Investasi | ... |
| AB-1 Beban Klaim dan Manfaat Program THT PNS | ... |
| AB-2 Beban Klaim dan Manfaat Program JKK ASN / Program JKM ASN | ... |
| AC-1 Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar Program THT PNS / Program JKK ASN / Program JKM ASN | ... |
| AD-1 Perkembangan Portofolio Program THT PNS / Program JKK ASN / Program JKM ASN | ... |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

D. FORMAT NERACA

| PENGELOLA PROGRAM I. NERACA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA NON KONSOLIDASI Per ... dan ... Triwulan... Tahun... * dan Triwulan... Tahun ... | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------------|-----|--------------------------|-----|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | | |
| No. | URAIAN | Rincian | Tahun .. Triwulan .. | | Tahun ... Triwulan .. | |
| | | | SAK | SAP | SAK | SAP |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | AKTIVA | | | | | |
| | Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito pada Bank | A-1 | | | | |
| 2 | Saham | B-1 | | | | |
| 3 | Obligasi | C-1 | | | | |
| 4 | Obligasi dengan mata uang asing | C-2 | | | | |
| 5 | Sukuk | D-1 | | | | |
| 6 | Surat Berharga Negara | E-1 | | | | |
| 7 | Medium Term Notes | F-1 | | | | |
| 8 | Utang Subordinasi | G-1 | | | | |
| 9 | Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | H-1 | | | | |
| 10 | Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | I-1 | | | | |
| 11 | Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | J-1 | | | | |
| 12 | Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | K-1 | | | | |
| 13 | Efek beragun aset | L-1 | | | | |
| 14 | Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | M-1 | | | | |
| 15 | Penyertaan Langsung | N-1 | | | | |
| 16 | Tanah dan Bangunan | O-1 | | | | |
| 17 | Investasi Lainnya | | | | | |
| | Jumlah Investasi | | | | | |
| | Bukan Investasi | | | | | |
| 18 | Kas dan Bank | | | | | |
| 19 | Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM | P-1 | | | | |
| 20 | Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT PNS | Q-1 | | | | |
| 21 | Piutang Investasi | R-1 | | | | |
| 22 | Piutang Hasil Investasi | S-1 | | | | |
| 23 | Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | T-1 | | | | |
| 24 | Aktiva Tetap Lain | | | | | |
| 25 | Aktiva Lain | | | | | |
| 26 | Jumlah Bukan Investasi | | | | | |
| 27 | JUMLAH AKTIVA | | | | | |
| | PASIVA | | | | | |
| | Kewajiban | | | | | |
| | Utang | | | | | |
| 28 | Utang Klaim | U-1 | | | | |
| 29 | Utang Investasi | V-1 | | | | |
| | Jumlah Utang | | | | | |
| | Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis | | | | | |
| 30 | Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | W-1 | | | | |
| 31 | Cadangan Teknis | X-1 | | | | |
| | Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis | | | | | |
| 32 | Kewajiban Lainnya | Y-1 | | | | |
| | Jumlah Kewajiban | | | | | |
| 33 | Pinjaman Subordinasi | | | | | |
| | Modal Sendiri | | | | | |
| 34 | Modal Disetor | | | | | |
| 35 | Agio Saham | | | | | |
| 36 | Cadangan | | | | | |
| 37 | Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga | | | | | |
| 38 | Selisih Penilaian Aktiva Tetap | | | | | |
| 39 | Saldo Laba | | | | | |
| 40 | Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP | | | | | |
| 41 | Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan | | | | | |
| 42 | Jumlah Modal Sendiri | | | | | |
| 43 | JUMLAH PASIVA | | | | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

E. FORMAT LABA RUGI (1)

| PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ... (dalam jutaan rupiah) | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| No. | URAIAN | Rincian | Tahun.... Triwulan... | Tahun.... Triwulan... | Akumulasi Tri I ... Tri ... |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | Pendapatan Premi | Z-1 | | | |
| 3 | Hasil Investasi | AA-1 | | | |
| 4 | Pendapatan PSL Pemerintah | | | | |
| 5 | Pendapatan Lain | | | | |
| 6 | Jumlah Pendapatan | | | | |
| 7 | BEBAN | | | | |
| 8 | Beban Klaim dan Manfaat | AB-1 | | | |
| 9 | a. Klaim | | | | |
| 10 | b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD | | | | |
| 11 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | | | | |
| 12 | Beban Investasi | | | | |
| 13 | Beban Usaha | | | | |
| 14 | Beban Lain | | | | |
| 15 | Jumlah Beban | | | | |
| 16 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | | | |
| 17 | PAJAK PENGHASILAN | | | | |
| 18 | LABA SETELAH PAJAK | | | | |

Catatan:
 *) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Rincian | Tahun.... Triwulan... | Tahun.... Triwulan... | Akumulasi Tri I ... Tri ... |
|-----|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | Pendapatan Premi | Z-1 | | | |
| 3 | Hasil Investasi | AA-1 | | | |
| 4 | Pendapatan Lain | | | | |
| 5 | Jumlah Pendapatan | | | | |
| 6 | BEBAN | | | | |
| 7 | Beban Klaim dan Manfaat | AB-2 | | | |
| 8 | a. Klaim | | | | |
| 9 | b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis | | | | |
| 10 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | | | | |
| 11 | Beban Investasi | | | | |
| 12 | Beban Usaha | | | | |
| 13 | Beban Lain | | | | |
| 14 | Jumlah Beban | | | | |
| 15 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | | | |
| 16 | PAJAK PENGHASILAN | | | | |
| 17 | LABA SETELAH PAJAK | | | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM
 II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
 3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Rincian | Tahun.... Triwulan... | Tahun.... Triwulan... | Akumulasi Tri I ... Tri ... |
|-----|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | Pendapatan Premi | Z-1 | | | |
| 3 | Hasil Investasi | AA-1 | | | |
| 4 | Pendapatan Lain | | | | |
| 5 | Jumlah Pendapatan | | | | |
| 6 | BEBAN | | | | |
| 7 | Beban Klaim dan Manfaat | AB-2 | | | |
| 8 | a. Klaim | | | | |
| 9 | b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis | | | | |
| 10 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | | | | |
| 11 | Beban Investasi | | | | |
| 12 | Beban Usaha | | | | |
| 13 | Beban Lain | | | | |
| 14 | Jumlah Beban | | | | |
| 15 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | | | |
| 16 | PAJAK PENGHASILAN | | | | |
| 17 | LABA SETELAH PAJAK | | | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM
III. LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| | Keterangan | Tahun... Triwulan... | Tahun... Triwulan... |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| A. | Saldo Awal : K a s - B a n k | | |
| B | Arus Kas dari Aktifitas Operasi Arus Kas Masuk 1 P r e m i 2 PSL Pemberi Kerja 3 Lain-lain | | |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | | |
| | Arus Kas Keluar 1 Klaim (Santunan) Program THT PNS 2 Klaim (Santunan) Program JKK ASN 3 Klaim (Santunan) Program JKM ASN 4 Lain-lain | | |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | | |
| | Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi | | |
| C | Arus Kas dari Aktifitas Investasi Arus Kas Masuk 1 Penerimaan Hasil Investasi 2 Pencairan Investasi 3 Penjualan Aktiva Tetap 4 Lain-lain | | |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | | |
| | Arus Kas Keluar 1 Penempatan Investasi 2 Pembelian Aktiva Tetap 3 Lain-lain | | |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | | |
| | Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi | | |
| D | Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan Arus Kas Masuk 1 Pinjaman Subordinasi 2 Setoran Modal 3 Lain-lain | | |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | | |
| | Arus Kas Keluar 1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi 2 Pembayaran Dividen 3 Lain-lain | | |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | | |
| | Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan | | |
| E | Saldo Akhir Kas (A+B+C+D) | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PENGELOLA PROGRAM
 IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| <u>Modal SAK</u> | | |
|------------------|--|-------|
| A. | Saldo Awal | _____ |
| B. | Penambahan: | _____ |
| | 1 Laba periode berjalan | _____ |
| | 2 Modal Disetor | _____ |
| | 3 Penambahan Lainnya: | _____ |
| | a. | _____ |
| | b. | _____ |
| | Jumlah Penambahan | _____ |
| C. | Pengurangan: | _____ |
| | 1 Pembayaran Dividen | _____ |
| | 2 Pengurangan Lainnya: | _____ |
| | a. | _____ |
| | b. | _____ |
| | Jumlah Pengurangan | _____ |
| D. | Saldo Akhir SAK (A+B-C) | _____ |
| <u>Modal SAP</u> | | |
| E. | Saldo Awal | _____ |
| F. | Perubahan Modal SAK (B - C) | _____ |
| G. | Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP | _____ |
| H. | Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan | _____ |
| I. | Saldo Akhir (E + F + G - H) | _____ |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
 V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
 APARATUR SIPIL NEGARA
 A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

| | Keterangan | Tahun... Triwulan... | Tahun... Triwulan... |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| A. | <u>Tingkat Solvabilitas</u> | | |
| | Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi) | | |
| | Jumlah Tingkat Solvabilitas | | |
| B. | <u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u> | | |
| | 2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM) | | |
| | Jumlah BTSM | | |
| C. | <u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u> | | |
| D. | <u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)</u> | | |

*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC 100.00%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
 V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
 APARATUR SIPIL NEGARA
 B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Uraian | Tahun... Triwulan... | Tahun... Triwulan... |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Likuiditas | | |
| | a. Kekayaan Lancar (Rincian AC-1) | | |
| | b. Kewajiban Lancar (Rincian AC-1) | | |
| | c. Rasio (a : b) | | |
| 2 | Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis | | |
| | a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no) | | |
| | b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis | | |
| | c. Rasio (a : b) | | |
| 3 | Rasio Pendapatan Investasi Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN | | |
| | a. Pendapatan Investasi | | |
| | b. Rata-rata Investasi | | |
| | c. Rasio (a : b) | | |
| 4 | Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN | | |
| | a. Beban Klaim | | |
| | b. Beban Usaha | | |
| | c. Pendapatan Premi | | |
| | d. Rasio Beban Klaim = a : c | | |
| | e. Rasio Beban Usaha = b : c | | |
| 5 | Rasio Perubahan Modal Sendiri | | |
| | a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan | | |
| | b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu | | |
| | c. Perubahan Modal Sendiri (a - b) | | |
| | d. Rasio (c : b) | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM
VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

| NO. | URAIAN | BIAYA DIKLAT | | |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (4) : (3) |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun
Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|-----|--|----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris | | |
| 2 | Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat) | | |
| | a. Diklat Pegawai | | |
| | b. Diklat Direksi | | |
| | c. Diklat Komisaris | | |
| 3 | Total Biaya Diklat (a + b + c) | | |
| 4 | Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1) | ...% | ...% |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP (dalam jutaan rupiah)

| No | URAIAN | Saldo Buku Besar (SAK) | Penilaian Berdasarkan SAP | Selisih Penilaian SAK dan SAP | Kekayaan yang tidak Diperkenankan | Kekayaan yang Diperkenankan (Saldo SAP) |
|-----|--|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Investasi | | | | | |
| 1 | Deposito pada Bank | | | | | |
| 2 | Saham | | | | | |
| 3 | Obligasi | | | | | |
| 3 | Obligasi dengan mata uang asing | | | | | |
| 4 | Sukuk | | | | | |
| 5 | Surat Berharga Negara | | | | | |
| 6 | Medium Term Notes | | | | | |
| 7 | Utang Subordinasi | | | | | |
| 8 | Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | | | | | |
| 9 | Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | | | | | |
| 10 | Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | | | | | |
| 11 | Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | | | | | |
| 12 | Efek beragun aset | | | | | |
| 13 | Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | | | | | |
| 14 | Penyertaan Langsung | | | | | |
| 15 | Tanah dan Bangunan | | | | | |
| 16 | Investasi Lainnya | | | | | |
| | Jumlah Investasi | | | | | |
| II | Bukan Investasi | | | | | |
| 17 | Kas dan Bank | | | | | |
| 18 | Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM | | | | | |
| 19 | Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT PNS | | | | | |
| 20 | Piutang Investasi | | | | | |
| 21 | Piutang Hasil Investasi | | | | | |
| 22 | Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | | | | | |
| 23 | Aktiva Tetap Lain | | | | | |
| 24 | Aktiva Lain | | | | | |
| | Jumlah Bukan Investasi | | | | | |
| | JUMLAH KEKAYAAN (I + II) | | | | | |

Catatan:
Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP (dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Saldo Buku Besar (SAK) | Penilaian Berdasarkan SAP | Selisih Penilaian SAK dan SAP |
|-----|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) - (4) |
| 1 | Utang Klaim | | | |
| 2 | Utang Investasi | | | |
| 3 | Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | | | |
| 4 | Cadangan Teknis | | | |
| 5 | Kewajiban Lainnya | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | | | |

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|---------|---|
| No. | Jenis Investasi | Rincian | Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi |
| 1 | Deposito pada Bank | A-1 | |
| 2 | Saham | B-1 | |
| 3 | Obligasi | C-1 | |
| 4 | Obligasi dengan mata uang asing | C-2 | |
| 5 | Sukuk | D-1 | |
| 6 | Surat Berharga Negara | E-1 | |
| 7 | Medium Term Notes | F-1 | |
| 8 | Utang Subordinasi | G-1 | |
| 9 | Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | H-1 | |
| 10 | Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | I-1 | |
| 11 | Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | J-1 | |
| 12 | Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | K-1 | |
| 13 | Efek beragun aset | L-1 | |
| 14 | Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | M-1 | |
| 15 | Penyertaan Langsung | N-1 | |
| 16 | Tanah dan Bangunan | O-1 | |
| | Total | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

| PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **) | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Per Triwulan... Tahun... *) | | | | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| No. | Penem-patan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan) | Jenis Investasi | Rincian | Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan | Kekayaa n Yang Diperken ankan |
| 1 | PT. | 1 | Deposito pada Bank | A-1 | |
| | | 2 | Saham | B-1 | |
| | | 3 | Obligasi | C-1 | |
| | | 4 | Obligasi dengan mata uang asing | C-2 | |
| | | 5 | Sukuk | D-1 | |
| | | 6 | Surat Berharga Negara | E-1 | |
| | | 7 | Medium Term Notes | F-1 | |
| | | 8 | Utang Subordinasi | G-1 | |
| | | 9 | Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | H-1 | |
| | | 10 | Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | I-1 | |
| | | 11 | Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | J-1 | |
| | | 12 | Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | K-1 | |
| | | 13 | Efek beragun aset | L-1 | |
| | | 14 | Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | M-1 | |
| | | 15 | Penyertaan Langsung | N-1 | |
| | | 16 | Tanah dan Bangunan | O-1 | |
| | | Total Penempatan pada Perusahaan ini | | | |
| 2 | PT. ... | 1 | Deposito pada Bank | A-1 | |
| | | 2 | Saham | B-1 | |
| | | 3 | Obligasi | C-1 | |
| | | 4 | Obligasi dengan mata uang asing | C-2 | |
| | | 5 | Sukuk | D-1 | |
| | | 6 | Surat Berharga Negara | E-1 | |
| | | 7 | Medium Term Notes | F-1 | |
| | | 8 | Utang Subordinasi | G-1 | |
| | | 9 | Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | H-1 | |
| | | 10 | Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | I-1 | |
| | | 11 | Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | J-1 | |
| | | 12 | Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | K-1 | |
| | | 13 | Efek beragun aset | L-1 | |
| | | 14 | Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | M-1 | |
| | | 15 | Penyertaan Langsung | N-1 | |
| | | 16 | Tanah dan Bangunan | O-1 | |
| | | Total Penempatan pada Perusahaan ini | | | |
| Total Penempatan Satu Pihak | | | | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai Program (Program THT PNS, Program JKK ASN, Program JKM ASN)

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI **)
Per
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|--------------------|---|--------------------------------|
| No. | Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan) | Jenis Investasi | Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan | Kekayaan Yang Diperkenankan |
| | Afiliasi karena Penyertaan : | | | |
| | Sub Total Penyertaan | | | |
| 1. | Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group | | | |
| | Sub Total Group | | | |
| 2. | Group | | | |
| | Sub Total Group | | | |
| | Total Persamaan Kepemilikan | | | |
| | Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi | | | |

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

| PENGELOLA PROGRAM | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP | | | | |
| SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *) | | | | |
| Per | | | | |
| Triwulan... Tahun... | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I Penyertaan | | | | |
| No. | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Kepemilikan | |
| | | | Prosentase | Nilai **) Kepemilikan |
| | | | | |
| II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan) | | | | |
| No. | Nama Perusahaan | Induk Perusahaan | | |
| | | | | |
| III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan) | | | | |
| No. | Nama Perusahaan | | | |
| | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

**) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK *) Per Triwulan... Tahun... | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|--|---|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| No. | Kode Akun | Nama Bank | Peringkat | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) | Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak) |
| 1 | | PT | | | | | |
| | | Deposito | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| 2 | | PT | | | | | |
| | | Deposito | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| 3 | | PT | | | | | |
| | | Deposito | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| 4 | | PT | | | | | |
| | | Deposito | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| 5 | | PT | | | | | |
| | | Deposito | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 SAHAM

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN B-1 SAHAM *) Per Triwulan... Tahun... | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|--|---|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| No. | Kode Akun | Nama Emiten/Penerbit | Kategori | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) | Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak) |
| I | | Diperdagangkan | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| II | | Tersedia Untuk Dijual | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | | | | | |
| Total | | | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut
 - b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 OBLIGASI

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 OBLIGASI *) Per Triwulan... Tahun... | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|---|---|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Penem- patan | Pela- poran | | | | | | |
| No. | Kode Akun | Nama Emiten/ Penerbit | | | Kate- gori | Saldo Buku Besar | Selisih Peni- laian SAK dan SAP | Keka- yaan Yang Diper- kenan- kan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) | Keteran- gan (Penem- patan pada satu pihak) |
| 1 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 2 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 3 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 4 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 5 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 6 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| | | T o t a l | | | | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT"
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG"
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-2 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN C-2
OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) No. | (2) Kode Akun | (3) Nama Emiten/ Penerbit | (4) Peringkat | | (5) Kategori | (6) Saldo Buku Besar | (7) Selisih Penilaian SAK dan SAP | (8) Kekayaan Yang Diperkenankan | (9) Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) | (10) Keterangan (Penempatan pada satu pihak) |
|------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | Penempatan | Pelaporan | | | | | | |
| 1 | | PT..... Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 2 | | PT..... Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 3 | | PT..... Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 4 | | PT..... Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 5 | | PT..... Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 6 | | PT..... Obligasi | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| | | T o t a l | | | | | | | | |

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT"
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG"
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - d. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - e. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN D-1
SUKUK *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|---|---|
| | | | Peringkat | | | | | | | |
| No. | Kode Akun | Nama Emiten/ Penerbit | Penem- patan | Pela- poran | Kate- gori | Saldo Buku Besar | Selisih Peni- laian SAK dan SAP | Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) | Keteran- gan (Penem- patan pada satu pihak) |
| 1 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Sukuk | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 2 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Sukuk | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 3 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Sukuk | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 4 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Sukuk | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 5 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Sukuk | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| 6 | | PT..... | | | | | | | | |
| | | Sukuk | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | | | |
| | | T o t a l | | | | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT"
 - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG"
 - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD"
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN E-1
SURAT BERHARGA NEGARA *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| No. | Kode Akun | Nama Emiten/ Penerbit | Saldo Buku Besar | Selisih Penilaian SAK dan SAP | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) |
| A | Dimiliki Hingga Jatuh Tempo | | | | | |
| | | Sub Total | | | | |
| B | Diperdagangkan | | | | | |
| | | Sub Total | | | | |
| C | Tersedia Untuk Dijual | | | | | |
| | | Sub Total | | | | |
| | | Total | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN F-1
MEDIUM TERM NOTES *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|
| No. | Kode Akun | Nama Emiten/ Penerbit | Saldo Buku Besar | Selisih Penilaian SAK dan SAP | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) | Keterangan (Penempatan pada satu pihak) |
| | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| | | Total | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)
Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN G-1
UTANG SUBORDINASI *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|
| No. | Kode Akun | Nama Emiten/ Penerbit | Saldo Buku Besar | Selisih Penilaian SAK dan SAP | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun) | Keterangan (Penempatan pada satu pihak) |
| | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | |
| | | Total | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AA. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (2)

PENGELOLA PROGRAM
 RINCIAN I-1
 REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN,
 DAN REKSA DANA INDEKS *)
 Per
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| No. | Kode Akun | Nama Reksa Dana | Manager Investasi | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) | Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total Reksadana | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)
 Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

DD. FORMAT LAPORAN RINCIAN L-1 EFEK BERAGUN ASET

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN L-1 EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Per Triwulan ... Tahun ... | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| No. | Kode Akun | Nama Perusahaan | Manager Investasi | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun) | Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak) |
| | | | | | | | |
| | | Total | | | | | |

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi"

FF. FORMAT LAPORAN RINCIAN N-1 PENYERTAAN LANGSUNG

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN N-1
PENYERTAAN LANGSUNG
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|---|--|
| No | Kode Akun | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Kepe- Milik- an (%) | Saldo Buku Besar | Selisih Peni- laian SAK dan SAP | Keka- yaan Yang Diperke- nankan | Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak) |
| | | | | | | | | |
| | | Total Penyertaan Langsung | | | | | | |

Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:

Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".

GG. FORMAT LAPORAN RINCIAN O-1 TANAH DAN BANGUNAN

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN O-1
TANAH DAN BANGUNAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per ...
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------|---------------|------------------|---|-------------------------------|
| No | Kode Akun | Alamat Lokasi | Saldo Buku Besar | Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai NJOP/ Appraisal) | Selisih Penilaian SAK dan SAP |
| | | | | | |
| | | Total | | | |

HH. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN P-1
PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM
ASN *)
Per ...
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| No | Kode Akun | Uraian | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun) |
| 1 | | PNS Pusat/ Daerah Otonom | | | |
| 2 | | PNS Perbantuan | | | |
| | | Total | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

II. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Q-1
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (*PAST SERVICE LIABILITY*)
PROGRAM THT PNS
Per ...
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------|--------|------------------|-----------------------------|--|
| No | Kode Akun | Uraian | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun) |
| | | | | | |
| | | Total | | | |

JJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN RINCIAN R-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN R-1
PIUTANG INVESTASI
PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
Per ...
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|
| No | Kode Akun | Jenis Investasi | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun) |
| | | | | | |
| | | Total | | | |

Rincian Piutang Menurut Umurnya

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| No | Kode | Jenis Investasi | Kurang dari atau sama dengan 1 bulan | Lebih dari 1 bulan |
| | | | | |
| | | Total | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

KK. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
 RINCIAN S-1
 PIUTANG HASIL INVESTASI
 PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
 Per ...
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|
| No | Kode Akun | Jenis Investasi | Saldo Buku Besar | Kekayaan Yang Diperkenankan | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun) |
| | | | | | |
| | | Total | | | |

Rincian Piutang Menurut Umurnya

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| No | Kode | Jenis Investasi | Kurang dari atau sama dengan 1 bulan | Lebih dari 1 bulan |
| | | | | |
| | | Total | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

LL. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (STRATA TITLE) ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN T-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (<i>STRATA TITLE</i>) ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN, YANG DIPAKAI SENDIRI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per ... Triwulan ... Tahun ... | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|---|-----|
| (dalam juta rupiah) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| No | Kode Akun | Alamat Lokasi | Saldo Buku Besar | Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai Appraisal/ NJOP) | SAP |
| | | | | | |
| | | Total | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

NN. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) | | | | |
|--|----------|-----------------|------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| No | KodeAkun | Jenis Investasi | Saldo Buku Besar | Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun) |
| | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

OO. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----------|-------------|-------|------------|
| No | Kode Akun | Uraian | KMPMD | Keterangan |
| | | | | |
| | | Total KMPMD | | |

(dalam juta rupiah)

PP. FORMAT LAPORAN RINCIAN X-1 CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM
 RINCIAN X-1
 CADANGAN TEKNIS
 PROGRAM JKK ASN / PROGRAM JKM ASN *)
 Per ...
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----------|-----------------------|-----------------|------------|
| No | Kode Akun | Uraian | Cadangan Teknis | Keterangan |
| | | | | |
| | | Total Cadangan Teknis | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

QQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN Y-1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

PENGELOLA PROGRAM
 RINCIAN Y-1
 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR
 PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
 Per ...
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|-----------|--------|--------|------------|
| No | Kode Akun | Uraian | Jumlah | Keterangan |
| | | | | |
| | | Total | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

RR. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 PENDAPATAN PREMI

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Z-1 PENDAPATAN PREMI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun | | | |
|---|--------------|--------|--------|
| (dalam juta rupiah) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| No. | Kode Akun | Uraian | Jumlah |
| | | | |
| | | Total | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

SS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) * |
| No. | Kode Akun | Jenis Investasi | Pendapatan Setelah Pajak (Realized) | | Unrealized Gain (Loss) | Total Hasil Investasi | Keterangan (Jenis Hasil) | |
| | | | Diterima Kas | Piutang | | | | |
| I | | Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | |
| II | | Penempatan Investasi Pada Afiliasi | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Sub Total | | | | | | |
| | | Hasil Investasi Bruto | | | | | | |
| | | Beban investasi | | | | | | |
| | | Hasil Investasi Neto | | | | | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima

TT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun (dalam juta rupiah) | | | |
|--|-----------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| No. | Kode Akun | Uraian | Jumlah |
| 1 | | Klaim Dwiguna | |
| 2 | | a. Pensiun | |
| 3 | | b. Klaim Meninggal | |
| 4 | | c. Keluar | |
| 5 | | Jumlah Klaim Dwiguna (2 + 3 + 4) | |
| 6 | | Klaim Asuransi Kematian | |
| 7 | | a. Peserta | |
| 8 | | b. Isteri/Suami | |
| 9 | | c. Anak | |
| 10 | | Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9) | |
| 11 | | Kenaikan (Penurunan) KMPMD | |
| 12 | | a. KMPMD tahun/triwulan berjalan | |
| 13 | | b. KMPMD tahun/triwulan lalu | |
| 14 | | Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13) | |
| 15 | | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14) | |

UU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun (dalam juta rupiah) | | | |
|--|-----------|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| No. | Kode Akun | Uraian | Jumlah |
| 1 | | Klaim Program JKK ASN/Program JKM ASN *) | |
| 2 | | a. | |
| 3 | | b. | |
| 4 | | Jumlah Klaim Program (2 + 3) | |
| 5 | | Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK ASN / Program JKM ASN *) | |
| 6 | | a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan | |
| 7 | | b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu | |
| 8 | | Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7) | |
| 9 | | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8) | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

VV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AC-1 KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah) | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| No. | Uraian | Tahun Triwulan | Tahun Triwulan |
| | AKTIVA | | |
| | Investasi | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | Jumlah Investasi | ... | ... |
| | Bukan Investasi | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | Jumlah Bukan Investasi | ... | ... |
| | JUMLAH KEKAYAAN LANCAR | | |
| | PASIVA | | |
| | Kewajiban | | |
| | Utang | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | Jumlah Utang | ... | ... |
| | Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis | | |
| | Cadangan Teknis | | |
| | Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | | |
| | Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis | | |
| | Kewajiban Lainnya | | |
| | Jumlah Kewajiban | ... | ... |
| | JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR | ... | ... |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN) Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan

WW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

| PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun | | | |
|---|--|----------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| No. | Uraian | Peserta(Orang) | Uang Pertanggung |
| | | | Rp. 000.000 |
| 1 | Pertanggung Aktif Akhir tahun/triwulan lalu | | |
| 2 | Pengurangan Pertanggung | | |
| 3 | a. Pensiun | | |
| 4 | b. Meninggal | | |
| 5 | c. Keluar | | |
| 6 | Jumlah Pengurangan Pertanggung (3 + 4 +5) | | |
| 7 | Jumlah Pertanggung Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (1 - 6) | | |

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim
- G. Format Laporan C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim
- K. Format Laporan F Cadangan Teknis

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan

Gedung Sutikno Slamet, Lt. 11

Jl. Dari. Wahidin Nomor 1

Jakarta - 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT DAFTAR ISI

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Pernyataan Aktuaria | |
| Direksi dan Tenaga Ahli | |
| A Perkembangan Portofolio Program THT PNS | |
| B1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT PNS | |
| B2 Laporan Utang klaim Program THT PNS | |
| C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) | |
| D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM Aparatur SipilNegara (ASN) | |
| E1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM ASN | |
| E2 Laporan Utang kalim Program JKK dan JKM ASN | |
| F Cadangan Teknis Program JKK dan JKM ASN | |

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

Pernyataan Aktuarial

Nama Perusahaan : PT Taspen (Persero)

Saya,, Fellow dari Persatuan Aktuaris
..... Reg. No....., dengan ini menyatakan
bahwa :

1. PT Taspen (Persero) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dan Cadangan Teknis Program JKK dan JKM;
2. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuarial yang lazim berlaku dan diterima secara umum;
3. Perhitungan KMPMD dan Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx/PMK.02/20xx tentang Kesehatan Keuangan Pengelola Program, Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua PNS, Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
4. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp (.....Rupiah)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, XXXX

.....
Aktuaris Reg. No.

D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

| Uraian | | Peserta (Orang) | Uang Pertanggung |
|---|-----|-----------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pertanggungungan yang masih berjalan pada awal triwulan | 1 | | |
| Pertanggungungan baru | 2 | | |
| Jumlah I (1+2) | 3 | | |
| Pensiun | 4 | | |
| Meninggal | 5 | | |
| Keluar | 6 | | |
| Jumlah II (4+5+6) | 7 | | |
| Pertanggungungan pada akhir triwulan (3 - 7) | 8 | | |

E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

| PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun... | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|--|---------|--|-----------------|---|---------|--|---------|---------------|---------|---|-------------------------|
| (dalam juta rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program THT | Klaim THT | Klaim dalam Proses Akhir triwulan/tahun lalu | | Klaim yang Dijjukan triwulan/ tahun Berjalan | | Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/ tahun Berjalan (Klaim yang harus Diproses) | | Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan dan telah Dibayar | | Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan tapi belum Dibayar | | Klaim Ditolak | | Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/ tahun berjalan | |
| | | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (3) + (5) | (8) = (4) + (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)=(7)-(9)-(11)-(13) | (16)=(8)-(10)-(12)-(14) |
| Asuransi Dwiguna | Pensiun | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meninggal | | | | | | | | | | | | | | |
| | Keluar | | | | | | | | | | | | | | |
| Asuransi Kematian | Peserta | | | | | | | | | | | | | | |
| | Isteri/Suami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | |

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
B-2. LAPORAN UTANG KLAIM
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

| Program THT | Klaim THT | Utang Klaim triwulan/tahun lalu | | Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar | | Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar | | Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan | |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------|---|---------|--|---------|---|------------------|
| | | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(3)+(5)-(7) | (10)=(4)+(6)-(8) |
| Asuransi Dwiguna | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | |

G. FORMAT LAPORAN C KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
C. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN (KMPMD)
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

| Uraian | KMPMD | | Premi |
|----------------------|-------------------|---------------|-------|
| | Triwulan Berjalan | Triwulan Lalu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| a. Asuransi Dwiguna | | | |
| b. Asuransi Kematian | | | |
| | | | |
| Jumlah | | | |

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA
D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

| Uraian | (2) | Peserta (Orang) | Uang Pertanggung |
|---|-----|-----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pertanggungungan yang masih berjalan pada awal triwulan | 1 | | |
| Pertanggungungan baru | 2 | | |
| Jumlah I (1+2) | 3 | ... | ... |
| Pensiun | 4 | | |
| Meninggal | 5 | | |
| Keluar | 6 | | |
| Jumlah II (4+5+6) | 7 | ... | ... |
| Pertanggungungan pada akhir triwulan (3 - 7) | 8 | ... | ... |

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

| PENGELOLA PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|---|------------|---|--------------------|--|------------|---|------------|------------------|------------|---|-------------------------------------|
| LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periode Triwulan... Tahun... | | | | | | | | | | | | | | | |
| (dalam juta rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program JKK/JKM | Klaim JKK/JKM | Klaim dalam Proses Akhir triwulan/ tahun lalu | | Klaim yang Diajukan triwulan/ tahun Berjalan | | Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/ tahun Berjalan (Klaim yang harus diproses) | | Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan dan telah Dibayar | | Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan tapi belum Dibayar | | Klaim Ditolak | | Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/ tahun berjalan | |
| | | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (3) + (5) | (8) = (4) + (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)=(7) -(9)-(11) (13) | (16)=(8) -(10)- (12)- (14) |
| Program JKK | Perawatan Santunan | | | | | | | | | | | | | | |
| Program JKM | Santunan | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | |

J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM

| PENGELOLA PROGRAM | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|---|------------------|
| LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM | | | | | | | | | |
| PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA | | | | | | | | | |
| E-2. LAPORAN UTANG KLAIM | | | | | | | | | |
| Periode Triwulan... Tahun... | | | | | | | | | |
| (dalam juta rupiah) | | | | | | | | | |
| Program JKK/JKM | Klaim JKK/JKM | Utang Klaim triwulan/tahun lahu | | Klaim yang Disetujui triwulan/ tahun berjalan tapi belum Dibayar | | Utang Klaim triwulan/tahun lahu yang Sudah Dibayar | | Utang Klaim Akhir triwulan/ tahun berjalan | |
| | | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta | Jml Peserta | Rp Juta |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(3)+(5)-(7) | (10)=(4)+(6)-(8) |
| Program JKK | Perawatan | | | | | | | | |
| | Santunan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Program JKM | Santunan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | |

K. FORMAT LAPORAN F CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
F. CADANGAN TEKNIS
Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

| Uraian | Cadangan Teknis | | Premi |
|----------------|-------------------|---------------|-------|
| | Triwulan Berjalan | Triwulan Lalu | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| a. Program JKK | | | |
| b. Progarm JKM | | | |
| | | | |
| Jumlah | | | |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)
- C. Format Laporan Keuangan (3)

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

| PT TASPEN (PERSERO) | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-----------------------------|--|-------|
| Kantor Pusat : Jl. | | | | | | |
| Laporan Keuangan Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara Per 31 Desember 20x3 dan 20x2 | | | | | | |
| (dalam juta rupiah) | | | | | | |
| K E K A Y A A N | | 20x3 | 20x2 | KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI | 20x3 | 20x2 |
| I. INVESTASI | | | | III. UTANG | | |
| 1 | Deposito pada Bank | | | 1 | Utang Klaim | |
| 2 | Saham | | | 2 | Utang Investasi | |
| 3 | Obligasi | | | 3 | Utang Lain | |
| 4 | Obligasi Dengan Mata Uang Asing | | | | | |
| 5 | Sukuk | | | | | |
| 6 | Surat Berharga Negara | | | 4 | Jumlah Utang (1 s/d 3) | |
| 7 | Medium Term Notes | | | | | |
| 8 | Utang Subordinasi | | | | | |
| 9 | Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham | | | | Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Dan Cadangan Teknis | |
| 10 | Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks | | | 5 | Cadangan Teknis Program JKK dan JKM | |
| 11 | Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas | | | 6 | Kewajiban Manfaat Polis MasaDepan | |
| 12 | Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI | | | 7 | Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (5+6) | |
| 13 | Efek beragun aset | | | | | |
| 14 | Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat | | | 8 | Kewajiban Lainnya | |
| 15 | Penyertaan Langsung | | | 9 | Jumlah Kewajiban(4 + 7 + 8) | |
| 16 | Tanah dan Bangunan | | | | | |
| 17 | Investasi Lainnya | | | | | |
| 18 | Jumlah Investasi (1 s/d 17) | | | 10 | Pinjaman Subordinasi | |
| II. BUKAN INVESTASI | | | | IV. MODAL SENDIRI | | |
| 19 | Kas dan Bank | | | 11 | Modal Disetor | |
| 20 | Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM | | | 12 | Agio Saham | |
| 21 | Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT PNS | | | 13 | Cadangan | |
| 22 | Piutang Investasi | | | 14 | Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga | |
| 23 | Piutang Hasil Investasi | | | 15 | Selisih Penilaian Aktiva Tetap | |
| 24 | Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | | | 16 | Saldo Laba | |
| 25 | Aktiva Tetap Lain | | | 17 | Jumlah Modal Sendiri (11s/d 16) | |
| 26 | Aktiva Lain | | | | | |
| 27 | Jumlah Bukan Investasi (19 s/d 26) | | | | | |
| 28 | Jumlah Kekayaan (18 + 227) | | | 18 | Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri (10+17) | |
| | | | | 19 | | |

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

| (dalam juta rupiah) | | | |
|---------------------|--|-------|-------|
| No. | U R A I A N | 20x3 | 20x2 |
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 2 | Pendapatan Premi | | |
| 3 | Hasil Investasi | | |
| 4 | Pendapatan PSL Pemerintah | | |
| 5 | Pendapatan Lain | | |
| 6 | Jumlah Pendapatan | | |
| 7 | BEBAN | | |
| 8 | Beban Klaim dan Manfaat | | |
| 9 | a. Klaim Program | | |
| | b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis | | |
| | b.1. Cadangan Teknis tahun/triwulan tahun berjalan | | |
| | b.2. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu | | |
| | c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD | | |
| 10 | c.1. KMPMD tahun/triwulan berjalan | | |
| 11 | c.2. KMPMD tahun/triwulan lalu | | |
| 12 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | | |
| 13 | Beban Investasi | | |
| 14 | Beban Usaha | | |
| 15 | Beban Lain | | |
| 16 | Jumlah Beban | | |
| 19 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | |
| 20 | PAJAK PENGHASILAN | | |
| 21 | LABA SETELAH PAJAK | | |

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

| (dalam juta rupiah) | | |
|--|----------------------------|-------|
| Keterangan | 20x3 | 20x2 |
| Pemenuhan Tingkat Solvabilitas | | |
| A. Tingkat Solvabilitas | | |
| a. Kekayaan Yang Diperkenankan | | |
| b. Kewajiban | | |
| c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | | |
| B. BTSM ²⁾ | | |
| C. Kelebihan (Kekurangan) BTS | | |
| D. Rasio Pencapaian (%) | | |
| Informasi Lain | | |
| a. Rasio Likuiditas (%) | | |
| b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD ¹⁾ | | |
| c. Rasio Pendapatan Investasi | | |
| d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha | | |
| e. Rasio Perubahan Modal Sendiri | | |
| <p>Keterangan :</p> <p>1) KMPMD =Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)</p> <p>2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM)</p> | | |
| KOMISARIS DAN DIREKSI | | |
| DEWAN KOMISARIS | | |
| KOMISARIS UTAMA : | | |
| KOMISARIS : | | |
| KOMISARIS : | | |
| DIREKSI | | |
| DIREKTUR UTAMA : | | |
| DIREKTUR : | | |
| DIREKTUR : | | |
| PEMILIK PERUSAHAAN | | |
| 1.% | | |
| 2.% | | |
| 3.% | | |
| <p>Catatan :</p> <p>a. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat "....."</p> <p>b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."</p> <p>c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK(Audit Report)</p> <p>d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$: Rp.</p> <p>e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$: Rp.</p> | | |
| Jakarta, (tanggal-bulan-tahun) | | |
| Direksi | | |
| Direktur Utama | Direktur Keuangan | |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI